

## **PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT MELALUI SOSIALISASI SKEMA PEMBIAYAAN KESEHATAN DUSUN NALEN SOROSUTAN YOGYAKARTA**

Totok Sundoro<sup>1</sup>, Sri Suryaningsih<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>)Program Studi Kesehatan Masyarakat STIKes Surya Global Yogyakarta

<sup>1</sup>)Email: [totoksundoro@gmail.com](mailto:totoksundoro@gmail.com)

### **ABSTRACT**

The purpose of community service activities is to increase understanding through socialization of the health financing scheme in the JKN program. The implementation method is carried out offline face-to-face socialization with stages of pre-test, socialization, question and answer and post-test. Participants in the community service activities were 35 people and were residents of Nalen Hamlet, Sorosutan Village Yogyakarta. The results achieved after the socialization activities were 91% of community participants who had a high understanding of the types of health insurance providers, 89% of the community's level of understanding increased regarding the Financing Procedures for Work Accident Cases/Occupational Diseases, and 94% of the community's level of understanding increased regarding the Financing Procedures for Traffic Accident Cases. It can be concluded that community service activities have a positive impact on the community in Nalen Hamlet, Sorosutan Village, Yogyakarta because they can increase community understanding of the financing scheme in the JKN program.

**Keywords:** *Health Financing Scheme; Improving Understanding; Socialization*

### **ABSTRAK**

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa upaya peningkatan pemahaman melalui sosialisasi tentang skema pembiayaan kesehatan dalam program JKN. Metode pelaksanaan dilakukan sosialisasi secara *offline* tatap muka dengan tahapan *pre-test*, sosialisasi, tanya jawab dan *post test*. Peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebanyak 35 orang dan merupakan warga masyarakat di Dusun Nalen Kelurahan Sorosutan Yogyakarta. Hasil yang dicapai setelah dilakukan kegiatan sosialisasi yaitu sebanyak 91% peserta masyarakat yang memiliki pemahaman tinggi terhadap jenis badan penyelenggara jaminan kesehatan, sebanyak 89% tingkat pemahaman masyarakat meningkat tentang Prosedur Pembiayaan Kasus Kecelakaan Kerja/Penyakit Akibat Kerja, dan sebanyak 94% tingkat pemahaman masyarakat meningkat terhadap Prosedur Pembiayaan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat berdampak positif bagi masyarakat di Dusun Nalen Kelurahan Sorosutan Yogyakarta karena dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang skema pembiayaan dalam program JKN.

**Kata Kunci:** Skema Pembiayaan Kesehatan; Peningkatan Pemahaman, Sosialisasi

## A. PENDAHULUAN

Setiap warga masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. (Undang-Undang No. 17 2023) Tanggung jawab Pemerintah adalah mengadakan dan mengatur upaya pelayanan kesehatan agar pemerataan pelayanan kesehatan dapat tercapai. Karena pentingnya jaminan perlindungan kesehatan maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang bertujuan untuk menjamin peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan serta menjamin seluruh rakyat Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam SJSN dibuat untuk memberikan jaminan kesehatan menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Adapun fokus penyelenggaraan JKN ditujukan pada perluasan kepesertaan menuju *Universal Health Coverage*. Dalam implementasinya, program JKN diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan diimplementasikan sejak tanggal 1 Januari 2014. (Adiyanta 2020)

BPJS Kesehatan menargetkan seluruh penduduk Indonesia dapat terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional paling lambat pada tanggal 1 Januari 2019 melalui upaya peningkatan kemitraan seluruh pemangku kepentingan dan mendorong kepesertaan masyarakat serta meningkatkan kepatuhan kepesertaan. Adanya target bagi BPJS kesehatan untuk mencapai *Universal Health Coverage* mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia wajib terdaftar sebagai peserta JKN. Oleh karena itu, penting bagi semua sektor untuk turut mendukung dan melakukan berbagai upaya agar seluruh masyarakat dapat terdaftar sebagai peserta JKN. (Fadila and Dewiyani 2021) Aspek kepesertaan merupakan indikator keberhasilan penyelenggaraan JKN. Dalam hal ini BPJS telah berupaya agar seluruh warga Indonesia dapat terdaftar dalam program JKN, namun faktanya kepesertaan masyarakat dalam program JKN masih sangat rendah terutama pada masyarakat pedusunan dan pinggiran kota. (Ayu Luthfia dan Husna 2018)

Dalam penyelenggaraan Jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan dapat berkoordinasi dengan Penyelenggara Jaminan selain BPJS Kesehatan melalui laporan dugaan kasus yaitu laporan kejadian kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan/atau kasus lain yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen (Persero), atau PT Asabri (Persero) dalam hal

diduga merupakan kasus kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja, sedangkan PT Jasa Raharja (Persero) dalam hal diduga merupakan kasus kecelakaan lalu lintas; BPJS Kesehatan dalam hal diduga merupakan kasus kecelakaan lalu lintas yang bukan kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja. (KMK 2018)

Program JKN sangat bermanfaat untuk memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kepemilikan BPJS Kesehatan saat ini masyarakat menganggap semua kasus penyakit dan cedera dapat ditanggung BPJS Kesehatan. Namun hal tersebut sebenarnya tidak tepat bahwa BPJS Kesehatan bukan penjamin tunggal. Ada badan pengelola selain BPJS Kesehatan yang mengatur dan mengelola manfaat pembiayaan kesehatan seperti BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen (Persero), PT ASABRI (Persero) dan PT. Jasa Raharja (Persero). Fakta di lapangan, pemahaman masyarakat masih rendah terhadap skema pembiayaan di Indonesia. Hasil observasi awal yang dilakukan, rendahnya kepesertaan masyarakat di Dusun Nalen Kelurahan Sorosutan Yogyakarta disebabkan minimalnya sosialisasi dari Pemerintah tentang skema pembiayaan. Selain itu, minimnya media promosi terkait program JKN seperti poster, spanduk, leaflet dan sebagainya sehingga masyarakat di Dusun Nalen Kelurahan Sorosutan Yogyakarta masih belum dapat memahami program JKN dengan baik. Disisi lain, prosedur untuk memperoleh pembiayaan pelayanan kesehatan dalam program JKN belum tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.

Penggunaan media cetak maupun media elektronik yang belum merata sepenuhnya kepada masyarakat dapat menyebabkan masyarakat tidak mengetahui tentang program JKN dengan baik. (Putrawan. dkk 2016) Disisi lain, meskipun masyarakat mengetahui bahwa hidup penuh dengan ketidakpastian yang akan menimbulkan risiko dan kerugian namun tidak semua orang dapat memiliki kesadaran untuk memiliki jaminan kesehatan. (Kurniawati et al. 2018) Kesadaran masyarakat dalam berasuransi merupakan suatu kondisi individu yang mengerti, mengetahui dan memahami akan produk asuransi dan manfaat dari berasuransi dan ditandai dengan keterbukaan dalam menerima dan memanfaatkan asuransi Kesehatan. (Prasetyo, Chabibah, and Haksama 2021)

Tingkat pengetahuan menjadi salah satu faktor penting yang berkontribusi pada kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam program JKN.(Fadila and Dewiyani 2021) Kurangnya informasi tentang program JKN menyebabkan masyarakat khususnya di tingkat bawah enggan mengikuti program JKN. (Laturrahmi et al. 2019) Selain itu masyarakat masih banyak yang belum menjadi peserta karena menganggap jaminan kesehatan bukanlah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga kesadaran untuk menjadi peserta JKN menjadi rendah. (Viona Febya Pangestika, Sutopo Patria Jati 2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Agustina et al. (2019) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya pengetahuan masyarakat, belum adanya sosialisasi mengenai JKN, dan sulitnya mengakses informasi JKN menjadikan masyarakat dari sektor informal belum mendaftar menjadi peserta JKN. Hal tersebut dikarenakan selama ini sumber informasi yang didapatkan hanya dari mulut ke mulut sehingga masyarakat dari sektor informal tidak mendapatkan informasi secara lengkap dan tidak mengetahui program JKN.

Selama ini masyarakat memahami kalau kasus kecelakaan ganda, kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja masuk dalam penjaminan BPJS Kesehatan. Padahal itu tidak tepat. Kasus tersebut untuk penjaminan pelayanan kesehatan dapat disesuaikan dengan Badan Pengelola Jaminan lain seperti PT. Jasa Raharja (Persero), BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen (Persero), dan PT ASABRI (Persero).

Upaya untuk meningkatkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap skema pembiayaan dalam program JKN dapat dilakukan melalui berbagai saluran media dan teknik promosi. Menurut (Budi Eko Siswoyo, Yayi Suryo Prabandari 2015) kegiatan sosialisasi dan promosi program JKN perlu menekankan pada pemberdayaan masyarakat. Optimalisasi sosialisasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat terhadap asuransi kesehatan nasional. Sosialisasi program JKN akan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan mengenai informasi JKN, peningkatan kesadaran masyarakat untuk menyisihkan pendapatan yang berguna saat masyarakat sakit dan adanya kesediaan masyarakat untuk mendaftarkan diri dan berpartisipasi dalam program JKN. (Rizky 2018)

Berbagai permasalahan dalam pelaksanaan JKN dapat diatasi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini kegiatan pengabdian kepada masyarakat dinilai memiliki urgensi terhadap peningkatan pemahaman masyarakat tentang skema pembiayaan dalam program JKN.

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang skema pembiayaan kesehatan dalam program JKN meliputi pemahaman masyarakat terhadap jenis Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, pemahaman tentang prosedur pembiayaan kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dan pemahaman tentang prosedur pembiayaan kasus kecelakaan lalu lintas.

## **B. METODE**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan menerapkan beberapa metode seperti *pre-test*, sosialisasi, tanya jawab dan *post test*. Keseluruhan kegiatan tersebut dilaksanakan offline tatap muka kepada 35 orang warga Dusun

Nalen Kelurahan Sorosutan Yogyakarta.

Metode *pre-test* digunakan untuk mengetahui pemahaman dan pengetahuan awal peserta tentang skema pembiayaan kesehatan dalam program JKN dan prosedur pembiayaan pelayanan kesehatan di era JKN. *Post-test* dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang sama seperti pertanyaan *pre test*.

Adapun materi yang diberikan terkait dengan skema pembiayaan kesehatan dalam program JKN di Indonesia. Selain itu juga disampaikan alur dan prosedur pengurusan jaminan kesehatan selain BPJS Kesehatan seperti BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen (Persero), PT ASABRI (Persero) dan PT Jasa Raharja (Persero). Skema pembiayaan merupakan struktur atau mekanisme pengumpulan, pengalokasian, dan pengelolaan dana untuk membiayai pelayanan kesehatan, yang bertujuan menjamin akses, mutu, dan keberlanjutan layanan bagi masyarakat dengan sumber dana dari pemerintah, swasta, masyarakat, atau kombinasi, seperti melalui Badan Pengelola Jaminan Sosial di Indonesia, dengan berbagai model pembayaran dan kepesertaan.

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi dengan peserta. Pada akhir kegiatan sosialisasi dan pendampingan, peserta diberikan *post test* tentang pemahaman dan pengetahuan akhir peserta tentang skema pembiayaan kesehatan dalam program JKN dan prosedur penjaminan pelayanan kesehatan di era JKN. Selanjutnya tim pengabdian membuat catatan sebagai bahan evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta evaluasi terkait hasil *pre-test* dengan hasil *post test* untuk mengetahui perbedaan pemahaman peserta sebelum dan setelah penyampaian materi.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebanyak 35 orang dan merupakan masyarakat Dusun Nalen Kelurahan Sorosutan Yogyakarta. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi secara *offline* ini sesuai dengan target yang diharapkan. Hasil *pre-test* untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap skema pembiayaan dalam program JKN di Dusun Nalen Kelurahan Sorosutan Yogyakarta meliputi Jenis Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, Prosedur Pembiayaan Kasus Kecelakaan Kerja dan Kasus Penyakit Akibat Kerja, serta Prosedur Pembiayaan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas menunjukkan hasil seperti tabel 1, tabel 2 dan tabel 3.

Tabel 1. Hasil Pretest Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Jenis Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan

No	Pengetahuan	Jumlah	Persentase
1	Rendah	30	86%
2	Tinggi	5	14%
Total		35	100%

Berdasarkan hasil *pre-test* dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat yang belum memahami Jenis Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan mempunyai tingkat pemahaman rendah yaitu sebanyak 30 orang (86%) sedangkan masyarakat yang sudah memahami Jenis Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan mempunyai tingkat pemahaman tinggi yaitu sebanyak 5 orang (14%).

Hasil *pre-test* terkait pertanyaan kedua untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap prosedur pembiayaan kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di Dusun Nalen Kelurahan Sorosutan Yogyakarta menunjukkan hasil seperti tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pretest Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Prosedur Pembiayaan Kasus Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat Kerja Dalam Program JKN

No	Pengetahuan	Jumlah	Persentase
1	Rendah	31	89%
2	Tinggi	4	11%
Total		35	100%

Berdasarkan hasil *pre-test* dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat yang belum memahami prosedur pembiayaan kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja mempunyai tingkat pengetahuan rendah yaitu sebanyak 31 orang (89%) sedangkan masyarakat yang sudah memahami prosedur pembiayaan kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja mempunyai tingkat pemahaman tinggi yaitu sebanyak 4 orang (11%).

Hasil *pre-test* terkait pertanyaan ketiga untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap prosedur pembiayaan kasus kecelakaan lalu lintas di Dusun Nalen Kelurahan Sorosutan Yogyakarta menunjukkan hasil seperti tabel 3.

Tabel 3. Hasil Pretest Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Prosedur Pembiayaan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Program JKN

No	Pengetahuan	Jumlah	Persentase
1	Rendah	25	71%
2	Tinggi	10	29%
Total		35	100%

Berdasarkan hasil *pre-test* dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat yang belum memahami prosedur pembiayaan kasus kecelakaan lalu lintas mempunyai tingkat pengetahuan rendah yaitu sebanyak 25 orang (71%) sedangkan masyarakat yang sudah memahami prosedur pembiayaan kasus kecelakaan lalu lintas mempunyai tingkat pemahaman

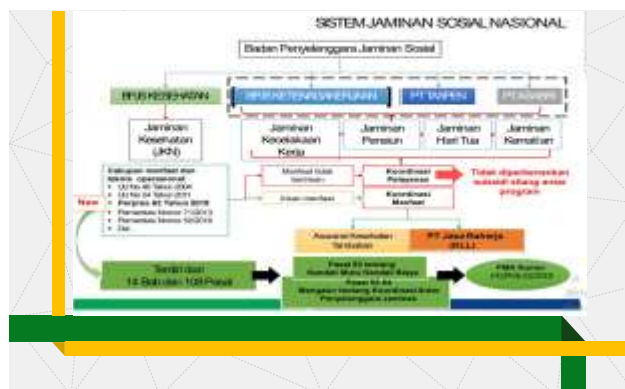
tinggi yaitu sebanyak 10 orang (29%).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menghadirkan narasumber dari dosen STIKes Surya Global Yogyakarta. Narasumber yang dihadirkan pada kegiatan ini merupakan praktisi, pakar dan para ahli di bidang pengelolaan jaminan kesehatan. Narasumber menyampaikan materi dan menayangkan dalam bentuk *power point*. Pelaksanaan sosialisasi berlangsung selama 1 hari yaitu hari Rabu tanggal 19 November 2025. Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung terkendali dan lancar seperti ditunjukkan pada gambar 1.



Gambar 1. Pemberian Materi oleh Narasumber melalui Sosialisasi Skema Penjaminan Kesehatan Dalam Program JKN

Kegiatan pengabdian masyarakat, Narasumber memaparkan tentang materi skema pembiayaan kesehatan dalam program JKN di Negara Indonesia saat ini dengan tujuan agar masyarakat memahami jenis badan pengelola jaminan kesehatan di Indonesia selain BPJS Kesehatan dan memahami alur prosedur pemanfaatan kepesertaan dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT. Taspen, (Persero), PT ASABRI, dan PT. Jasa Raharja (Persero). Adapun skema pembiayaan kesehatan ditunjukkan pada Gambar 2. Pada gambar 2 dijelaskan bahwa badan penjamin layanan kesehatan di Indonesia selain BPJS Kesehatan yang perlu diketahui masyarakat antara lain: BPJS Ketenagakerjaan, PT. Taspen, (Persero), PT ASABRI, dan PT. Jasa Raharja (Persero).



Gambar 2. Skema Pembiayaan Kesehatan Dalam Program JKN

Adapun skema pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. BPJS Kesehatan (Peserta KIS)

Masyarakat akan dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan khusus pada peserta yang sakit atau cidera atau kecelakaan tunggal BUKAN kasus PENYAKIT atau KECELAKAAN AKIBAT KERJA.

2. BPJS Ketenagakerjaan

Peserta BPJS Ketenagakerjaan berasal dari Pekerja Penerima Upah sektor Swasta dan Peserta Pekerja Mandiri seperti: Tukang Parkir, tukang Ojek, Tukang Becak, Freelancer, Event Organizer, Konten Kreator, Pedagang pasar, Pedagang Online shop, Asisten rumah tangga, Nelayan, Petani, Penderes, Guru Ngaji, Marbot Masjid, dll.

Dari semua yang tersebut jika sakit akibat bekerja atau kecelakaan kerja maka akan dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan BUKAN BPJS Kesehatan.

Apabila terjadi Kasus Kecelakaan lalu lintas Ganda (Kecelakaan kerja), maka BPJS Ketenagakerjaan akan sebagai penjamin kedua setelah PT. Jasa Raharja (Persero). Untuk kecelakaan tunggal yang terjadi pada peserta ini akan dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan setelah mendapatkan surat keterangan kepolisian yang menyatakan kecelakaan tunggal akibat/saat kerja.

Permasalahannya adalah: sudahkan anda terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan? Jika belum, mari segera daftarkan diri anda apabila anda pekerja yang masuk kriteria sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

3. PT. Taspen(Persero) & PT. ASABRI (Persero)

Prinsipnya sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, namun jenis pesertanya yang berbeda. Adapun peserta PT. Taspen (Persero) adalah pegawai ASN (PNS) sedangkan peserta PT. ASABRI (Persero) adalah TNI & POLRI.

4. PT. Jasa Raharja (Persero)

PT. Jasa Raharja (Persero) menjamin kasus kecelakaan lalu lintas ganda. Namun perlu dipahami bersama bahwa PT. Jasa Raharja (Persero) mengeluarkan edaran Nomor: Kep/132/2023, 2 Oktober 2023 tentang Penyelesaian Santunan Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Akibat Tabrakan Dua Atau Lebih Kendaraan, (berlaku pada tanggal 2 Oktober 2023), Ada enam kasus laka lant as yang tidak diberikan santunan Jasa Raharja yaitu: Melawan arus lalu lintas; Berkendara tanpa SIM yang sah; Mengemudi kendaraan bermotor yang di modifikasi yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; Menerobos palang pintu kereta api; Berkendara dengan tidak wajar untuk membuat konten yang membahayakan

Kamseltibcarlantas (Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas); dan Berkendara dengan kendaraan yang tidak teregistrasi di Samsat atau tidak dilengkapi dengan surat tanda coba Kendaraan bermotor.

“Sehat bukan segalanya, namun tanpa kesehatan, segalanya menjadi tak berarti. Di masa kini, menjaga agar tetap sehat dan memulihkan keadaan sakit menjadi sehat kembali, kadang memerlukan uang yang tak sedikit. Mari ikut jaminan kesehatan sehingga Anda senantiasa siap menghadapi keadaan darurat kesehatan yang sewaktu-waktu dapat menimpa.

Evaluasi terhadap minat masyarakat untuk bersedia mengikuti sosialisasi dengan baik terlihat banyaknya peserta yang bertanya mengenai topik yang disampaikan mulai dari alur prosedur penggunaan jaminan kesehatan yang ada di negara Indonesia dapat ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan berikutnya, Narasumber melakukan evaluasi dengan memberikan pertanyaan *post test* kepada peserta/masyarakat terkait hasil kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap skema pembiayaan kesehatan dalam program JKN yang menunjukkan hasil seperti tabel 4.

Tabel 4 Hasil *Post-Test* Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Skema Pembiayaan Kesehatan Dalam Program JKN

Pertanyaan	Tingkat Pemahaman		
	Rendah	Tinggi	Total
Jenis Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan	3 (9%)	32 (91%)	35 (100%)
Prosedur Pembiayaan Kasus Kecelakaan Kerja/Penyakit Akibat Kerja	4 (11%)	31 (89%)	35 (100%)
Prosedur Pembiayaan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas	2 (6%)	33 (94%)	35 (100%)

Berdasarkan hasil *post-test* dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap skema pembiayaan kesehatan dalam program JKN. Hal

tersebut ditunjukkan bahwa sebelum dilaksanakan sosialisasi, terdapat 5 orang (14%) masyarakat yang memiliki pemahaman tinggi terhadap jenis badan penyelenggara jaminan kesehatan dalam program JKN namun setelah dilaksanakan sosialisasi, masyarakat yang memiliki pemahaman tinggi terhadap jenis badan penyelenggara jaminan kesehatan dalam program JKN menjadi 32 orang (91%).

Berkaitan dengan pemahaman masyarakat tentang Prosedur Pembiayaan Kasus Kecelakaan Kerja/Penyakit Akibat Kerja, sebelum dilakukan sosialisasi terdapat 4 orang (11%) masyarakat memiliki pemahaman tinggi, namun setelah dilakukan sosialisasi pemahaman masyarakat rendah menjadi 31 orang (89%). Sedangkan pemahaman masyarakat terhadap Prosedur Pembiayaan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas sebelum dilakukan sosialisasi dengan tingkat pemahaman tinggi sebanyak 10 (29%) dan setelah dilakukan sosialisasi menjadi 33 orang (94%) dengan tingkat pemahaman tinggi.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjelaskan tentang jenis badan penyelenggara kesehatan di Indonesia selain BPJS Kesehatan meliputi BPJS Ketenagakerjaan, PT. Jasa Raharja (Persero), PT Taspen (Persero), dan PT ASABRI (Persero). Materi kedua membahas tentang Prosedur Pembiayaan Kasus Kecelakaan Kerja/Penyakit Akibat Kerja dan materi ketiga membahas tentang Prosedur Pembiayaan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas.

Berdasarkan sesi tanya jawab yang dilakukan selama penyampaian materi terungkap bahwa mayoritas masyarakat di Dusun Nalen Kelurahan Sorosutan Yogyakarta belum mendapatkan informasi yang jelas terkait skema pembiayaan kesehatan dalam program JKN baik melalui sosialisasi, media masa cetak maupun elektronik. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara jelas bagaimana mekanisme pengurusan jaminan kesehatan karena belum pernah ada sosialisasi yang dilakukan ditingkat Kelurahan Sorosutan Yogyakarta. Hal tersebut terungkap dari hasil diskusi bahwa masyarakat masih mengalami kebingungan dan merasa bahwa dengan memiliki BPJS Kesehatan kasus penyakit akibat kerja, kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas dapat dijamin.

Kegiatan sosialisasi skema pembiayaan kesehatan dalam program JKN berdasarkan ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengatur Badan Penyelenggaran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/2018 yang mengatur tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan.

Kegiatan sosialisasi juga membahas tentang prosedur penjaminan kasus kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang mekanisme diatur oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk

peserta sektor swasta, PT Taspen (Persero) untuk peserta Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PT ASABRI (Persero) untuk peserta sektor TNI/POLRI. Kemudian pada kasus kecelakaan lalu lintas ganda untuk penjamin pertama PT Jasa Raharja (Persero) dengan jaminan pembiayaan maksimal Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Tingkat pemahaman masyarakat tentang skema pembiayaan kesehatan dalam program JKN semakin meningkat setelah dilaksanakan sosialisasi. Hal ini sejalan dengan Sri Maryuni, Agus Eka (2019) yang menyatakan bahwa masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi tentang program JKN telah memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang perubahan mekanisme dalam sistem jaminan Kesehatan dan menyadari pentingnya keikutsertaan seluruh masyarakat dalam program JKN agar dapat mencapai *Universal Health Coverage*.

Setelah pemataran materi, masyarakat mulai memahami bahwa skema pembiayaan kesehatan dalam program JKN perlu diketahui atau dipahami agar masyarakat menggunakan jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan kasusnya. Masyarakat juga lebih memahami jenis badan penyelenggara jaminan kesehatan di Indonesia meliputi BPJS Kesehatan untuk kasus penyakit dan kecelakaan bukan akibat kerja, BPJS Ketenagakerjaan untuk menjaminan kasus penyakit dan kecelakaan akibat kerja disektor swasta, PT Taspen (Persero) untuk penyakit dan kecelakaan akibat kerja pada sektor Aparatur Sipil Negara (ASN), PT ASABRI (Persero) untuk penyakit dan kecelakaan akibat kerja sektor TNI/Polri dan PT Jasa Raharja untuk kecelakaan ganda penjamin pertama. Peserta BPJS Ketenagakerjaan berasal dari Pekerja Penerima Upah sektor Swasta dan Peserta Pekerja Mandiri seperti: Tukang Parkir, tukang Ojek, Tukang Becak, *Freelancer*, *Event Organizer*, Konten Kreator, Pedagang pasar, Pedagang *Online shop*, Asisten rumah tangga, Nelayan, Petani, Penderes, Guru Ngaji, Marbot Masjid, dll.

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap skema pembiayaan kesehatan dalam program JKN semakin meningkat setelah pelaksanaan sosialisasi. Hasil *post test* yang dilakukan dengan peserta ditemukan fakta bahwa 91% peserta masyarakat yang memiliki pemahaman tinggi terhadap jenis badan penyelenggara jaminan kesehatan, sebanyak 89% tingkat pemahaman masyarakat meningkat tentang Prosedur Pembiayaan Kasus Kecelakaan Kerja/Penyakit Akibat Kerja, dan sebanyak 94% tingkat pemahaman masyarakat meningkat terhadap Prosedur Pembiayaan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas. Masyarakat sebagai pekerja mandiri termotivasi mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk mengantisipasi apabila terjadi kecelakaan kerja. Masyarakat yang mendapatkan pengetahuan dan informasi dengan tepat dapat meningkatkan motivasi dan keyakinan masyarakat untuk berpartisipasi

dalam program JKN. (Sirait et al. 2024)

Meskipun demikian tingginya kesadaran tidak menjamin masyarakat yang belum menjadi peserta memutuskan untuk masuk dalam program JKN seperti BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dalam kemampuan ekonomi untuk membayar iuran yang harus dibayarkan setiap bulannya, sehingga masyarakat masih berpikir bahwa jika mereka tidak mengalami sakit, maka besaran iuran yang mereka bayarkan setiap bulan akan menjadi percuma jika tidak digunakan. Hal tersebut yang menjadikan masyarakat berpikir ulang untuk mengikuti program JKN. Iuran yang lebih besar dari kemampuan membayar cenderung menjadikan masyarakat menunda untuk menjadi peserta JKN sehingga terbatasnya kemampuan membayar masyarakat juga berdampak negatif pada kesadaran terhadap program asuransi Kesehatan. (Fadila and Dewiyani 2021)

Faktor pendukung kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang skema pembiayaan kesehatan dalam program JKN di Dusun Nalen Kelurahan Sorosutan Yogyakarta adalah tingginya semangat dan antusiasme peserta untuk dapat bergabung dalam kegiatan. Hal tersebut terbukti dengan tingginya antusiasme peserta dalam mengajukan pertanyaan. Selain itu, belum pernah dilakukan sosialisasi terkait skema pembiayaan kesehatan dalam program JKN di wilayah Kelurahan Sorosutan Yogyakarta sehingga antusiasme masyarakat untuk menambah pengetahuan dan pemahaman terkait skema pembiayaan kesehatan sangat tinggi.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan implementasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat berdampak positif bagi masyarakat di Dusun Nalen Kelurahan Sorosutan Yogyakarta. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi telah mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang skema pembiayaan kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kepesertaan program JKN. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan dapat diajukan beberapa saran yaitu terkait waktu dan peserta pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat perlu ditambah. Selain itu, perlu dilakukan kegiatan sejenis secara periodik agar masyarakat mendapatkan literasi yang baik terkait skema pembiayaan kesehatan.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

Adiyanta, F. C. Susila. 2020. "Urgensi Kebijakan Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage ) Bagi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19." 3(2):272–99.

- Agustina, Zulfa Auliyati, Turniani Laksmiarti, Ermawan Effendi, Pusat Penelitian, Manajemen Kesehatan, and Badan Penelitian. 2019. "Pemilihan Metode Sosialisasi Sebagai Upaya Peningkatan Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ) Mandiri." 33–38. doi:10.22435/mpk.v28i1.7638.33-38.
- Ayu Luthfia dan Husna. 2018. "Analisis Faktor Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Desa Pasireurih." 6(2).
- Budi Eko Siswoyo, Yayi Suryo Prabandari, Yulita Hendrartini. 2015. "KESADARAN PEKERJA SEKTOR INFORMAL TERHADAP PROGRAM." 04(04):118–25.
- Fadila, Rizki, and Citra Dewiyani. 2021. "Sosialisasi Dan Pendampingan Masyarakat Tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional." 4:224–31.
- KMK, 141. 2018. *KOORDINASI ANTAR PENYELENGGARA JAMINAN DALAM PEMBERIAN MANFAAT PELAYANAN KESEHATAN.*
- Kurniawati, Wahyu, Riris Diana Rachmayanti, Kesehatan Masyarakat, and Universitas Airlangga. 2018. "IDENTIFIKASI PENYEBAB RENDAHNYA KEPESERTAAN JKN PADA." 6:33–39.
- Laturrahmi, Yun Fitrihyati, Sinta Swastikawara, Nilam Wardasari, and Desa Boro. 2019. "Analisis Perilaku Masyarakat Pedesaan Terhadap Asuransi Kesehatan Nasional Dalam Perspektif Komunikasi Kesehatan." 87–100.
- Prasetyo, Rahmat Adi, Afifa Nur Chabibah, and Setya Haksama. 2021. "Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pengetahuan Terhadap Kepemilikan BPJS Ketenagakerjaan Pada Relawan Penanggulangan Bencana Gunung Semeru Tahun 2021." 2999:61–66. doi:10.17977/um044v7i22022p61-66.
- Putrawan. dkk, Agus. 2016. "Studi Kualitatif Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Oleh BPJS Kesehatan Di Kecamatan Tinaggea Kabupaten Konawe Selatan." <https://media.neliti.com/media/publications/185421-ID-studi-kualitatif-pelaksanaan-jaminan-kes.pdf>.
- Rizky, Kartika Dhita Eka. 2018. "IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN."
- Sirait, Reni Aprinawaty, Bambang Sumantri, Felix Kasim, Anggi Kurnia, and Luci Riani Br. 2024. "Sosialisasi Kepesertaan BPJS Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) Sebagai Upaya Universal Health Coverage Di Desa Perbarakan Kabupaten Deli Serdang Socialization of BPJS Participation in National Health Insurance ( JKN ) Program as an Effort to Achieve Universal Health Coverage in Perbarakan Village , Deli Serdang Regency." 260–67.
- Sri Maryuni, Agus Eka, dan Pardi. 2019. "SOSIALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI KEPESERTAAN MANDIRI BPJS KESEHATAN DI DESA SUNGAI BELIDAK KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA." 14(April).
- Undang-Undang No. 17. 2023. "Kesehatan."
- Viona Febya Pangestika, Sutopo Patria Jati, Ayun Sriatmi. 2017. "FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPESERTAAN SEKTOR INFORMAL DALAM BPJS KESEHATAN MANDIRI DI KELURAHAN PONCOL, KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR, KOTA PEKALONGAN." 5:39–49.